

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka dalam penulisan penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya yang dianggap mendukung teori-teori dan sumber pustaka terkait, yang dapat menjelaskan perumusan masalah yang telah ditentukan. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan, kemudian dianalisis berdasarkan pokok permasalahan, teori, dan metode yang digunakan, sehingga dapat diketahui perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis.

1. Tasha Ratna Dewi dan Meilani Purwanti (2024) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Tingkat Pendidikan, dan Latar Belakang Pendidikan terhadap Penerapan SAK di Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung” penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dan menggunakan metode analisis regresi berganda dengan SPSS 26. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAK EMKM.
2. Vera Periska, Yanti, dan Awaliawati Rachpriliani (2024) dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, dan Kesiapan Pelaku UMKM Terhadap Penerapan SAK EMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan UMKM” penelitian ini menggunakan metodologi

kuantitatif dengan pengumpulan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAK EMKM.

3. Vira Adilla dan Vina Merliana (2024) dengan judul “Pengaruh Persepsi Pelaku Umkm, Pemahaman Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penerapan Sak Emkm” penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Akuntansi berpengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM.
4. Yulita Della Rosa Nurzairina (2022) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Tingkat Pendidikan, Umur Usaha, Motivasi Usaha, dan Kepribadian Pemilik Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM)” penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM.
5. Nindya Pranandisya dan Nugraeni Nugraeni (2023) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kesiapan Pelaku UMKM, dan Persepsi UMKM terhadap Implementasi SAK EMKM pada Laporan Keuangan UMKM” Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode analisis data menggunakan uji statistik menggunakan SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM.

B. Deskripsi Teori

1. Pemahaman Akuntansi

Pemahaman akuntansi mencakup kemampuan individu atau kelompok untuk memahami, mengaplikasikan, dan menganalisis konsep-konsep akuntansi yang mendasar hingga lanjutan. Menurut (Purwanti et al., 2021), pemahaman akuntansi adalah kemampuan untuk menangkap baik pentingnya maupun signifikansi dari praktik pembukuan, termasuk perincian data keuangan yang mendukung pengelolaan usaha secara efektif. Pemahaman yang baik terhadap pembukuan diandalkan untuk memberikan keuntungan bagi kemajuan suatu usaha, karena laporan keuangan yang tersusun dengan baik akan memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan bagi pengambilan keputusan.

Sementara itu, (IAI, 2018) menyatakan bahwa akuntansi adalah "bahasa bisnis" yang berfungsi untuk menyampaikan informasi keuangan dari suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal. Informasi ini mencakup kinerja keuangan selama periode tertentu dan posisi keuangan pada titik waktu tertentu. Dengan akuntansi, pihak-pihak terkait dapat mengevaluasi, mengelola, dan merencanakan strategi masa depan berdasarkan data

yang ada. Dalam sistem akuntansi, transaksi keuangan diolah melalui proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan.

Oleh karena itu, pemahaman akuntansi tidak hanya melibatkan kemampuan teknis untuk mencatat dan melaporkan transaksi, tetapi juga melibatkan pemahaman konseptual tentang bagaimana informasi akuntansi dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan dan pengambilan keputusan yang strategis. Komponen pemahaman akuntansi (Shatu, 2016):

1. Transaksi Akuntansi

Kemampuan untuk mengenali dan mencatat setiap transaksi yang terjadi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

2. Dokumentasi Transaksi

Pemahaman terhadap pentingnya menyimpan bukti transaksi seperti faktur, kuitansi, atau nota sebagai dasar pencatatan keuangan.

3. Penyusunan Laporan Keuangan

Proses pengolahan data keuangan menjadi laporan yang sesuai dengan standar akuntansi, seperti laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi.

Terdapat indikator-indikator yang menjadi panduan pemahaman akuntansi. Berikut penjelasan indikator pemahaman akuntansi (Shatu, 2016):

1. Memahami Transaksi Akuntansi

Mampu mengidentifikasi dan mencatat transaksi keuangan dengan benar.

2. Memahami Tahapan Pembuatan Laporan Keuangan

Menguasai proses penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan hingga pelaporan.

3. Memahami Pencatatan Akuntansi

Dapat mencatat transaksi berdasarkan bukti yang sah secara sistematis.

4. Memahami Penyusunan Laporan Keuangan

Mampu menyusun laporan keuangan yang relevan dan andal sesuai standar akuntansi.

5. Membuat Laporan Keuangan Sesuai Standar

Menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), termasuk SAK EMKM, untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi.

2. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) Pada UMKM

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 24 Oktober 2016 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2018. SAK EMKM dirancang

untuk membantu entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan yang memenuhi kriteria UMKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. Menurut (Peranginangin et al., 2024), laporan keuangan adalah dokumen tertulis yang digunakan organisasi untuk menyampaikan informasi mengenai hasil operasional, posisi keuangan, dan arus kas mereka kepada pihak yang berkepentingan, seperti investor, kreditor, dan otoritas pajak, dengan tujuan mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Sementara itu, (IAI, 2018) menambahkan bahwa laporan keuangan harus disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dengan penyajian yang jujur dan wajar atas transaksi dan peristiwa keuangan yang relevan selama periode tertentu. Berdasarkan kedua definisi di atas maka SAK EMKM bertujuan menyediakan panduan akuntansi yang sederhana, relevan, dan dapat diterapkan oleh UMKM untuk meningkatkan transparansi keuangan dan mempermudah akses terhadap sumber pendanaan eksternal, baik dari lembaga keuangan maupun investor. Indikator Penerapan SAK EMKM mensyaratkan penyusunan tiga jenis laporan keuangan menurut (IAI-SEM EMKM, 2016), yaitu:

1. Laporan Posisi Keuangan

Menyajikan informasi aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode.

2. Laporan Laba Rugi

Mengungkap kinerja keuangan berupa penghasilan dan beban selama periode tertentu.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Memuat kebijakan akuntansi, informasi tambahan, dan penjelasan pos penting.

3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan kerja dan berperan penting dalam proses pemerataan serta peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 20, 2008, ketentuan umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi

kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

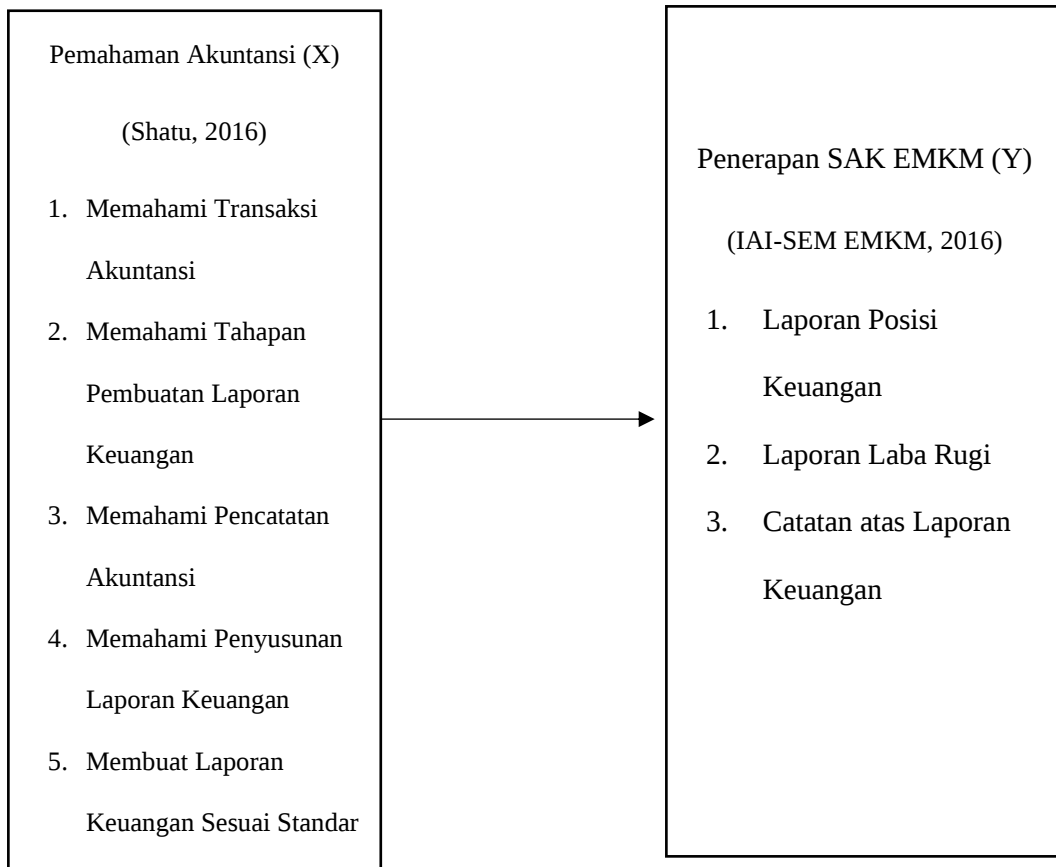
Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2022), usaha kuliner dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, antara lain: usaha makanan berat (seperti warung makan, rumah makan khas daerah), makanan ringan (seperti gorengan dan jajanan pasar), usaha minuman (seperti kedai kopi dan minuman kekinian), jasa boga (catering), serta makanan beku dan makanan sehat.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (2020) melalui Klasifikasi Baku 5 Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) mengelompokkan kegiatan usaha kuliner ke dalam beberapa kode, seperti restoran (56101), kafetaria (56102), warung makan (56103), hingga jasa boga (56291) dan penyedia minuman (56301). Pengelompokan ini membantu dalam memahami keragaman bentuk usaha kuliner, yang masing-masing memiliki tingkat kompleksitas pengelolaan keuangan yang berbeda. Keragaman ini menunjukkan bahwa sektor kuliner di daerah ini berkembang secara dinamis dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam aspek pencatatan keuangan yang sesuai standar.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah model yang menggambarkan bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang dianggap penting dalam suatu masalah. Kerangka ini berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti secara teoritis. Hubungan antara variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) perlu dijelaskan. Jika ada variabel moderator dalam penelitian, maka alasan memasukkannya juga harus dijelaskan. Hubungan antar variabel ini kemudian dirumuskan dalam bentuk paradigma penelitian (Sugiyono, 2019). Oleh karena itu, penyusunan paradigma penelitian harus selalu berdasarkan kerangka konseptual.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Sumber: Data diolah, 2025

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara yang dimaksud untuk menjawab permasalahan yang ada. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis

terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Berdasarkan kerangka pemikiran dan rumusan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:

H_a : Terdapat pengaruh pemahaman akuntansi terhadap penerapan SAK EMKM pada Pelaku UMKM sektor kuliner di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.

H_0 : Tidak terdapat pengaruh pemahaman akuntansi terhadap penerapan SAK EMKM pada Pelaku UMKM sektor kuliner di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.